

## PENGARUH LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI DI INDONESIA PERIODE 2017-2021

**TB. Agung Amaludin<sup>1</sup>, Anggun Putri Romadhina<sup>2</sup>,\***

<sup>1,2</sup>Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia \*

### ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of economic growth rates and inflation rates on local tax revenues in provinces in Indonesia for the 2017-2021 period. The type of research used is quantitative by using data collection methods using secondary data. The sampling technique used is the saturated sample method, namely the method of determining the sample with the entire population as the research sample. The population in this study is 34 provinces in Indonesia for the 2017-2021 period. The results of the study prove that simultaneously the rate of economic growth and the rate of inflation has a significant effect on local tax revenues, partially the rate of economic growth has a significant effect on local tax revenues and the inflation rate variable also has a significant effect on local tax revenues in provinces in Indonesia.*

**Keywords:** *Economic Growth Rate, Inflation Rate, Regional Tax Revenue*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi di Indonesia periode 2017-2021. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data menggunakan data sekunder. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah metode sampel jenuh, yakni metode penentuan sampel dengan seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 34 provinsi di Indonesia periode 2017-2021. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara simultan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, secara parsial laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan variabel tingkat inflasi juga berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi di Indonesia.

**Kata kunci :** Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Penerimaan Pajak Daerah

**Korespondensi:** TB. Agung Amaludin, S.Ak., Universitas Pamulang, Kp. Sukamandi Ds. Sukaseneng, Kec. Cikeusik, Pandeglang-Banten, Kode Pos. 42286, Email: [tbagungamaludin24@gmail.com](mailto:tbagungamaludin24@gmail.com)

## I. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, pertumbuhan ekonomi menjadi fokus setiap negara untuk memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, melalui pembangunan ekonomi maka akan lahir banyak lapangan kerja sehingga banyak masyarakat yang mulai berpenghasilan dan dapat meningkatkan taraf hidupnya. Di Indonesia sendiri pemulihan ekonomi masih berlanjut meski di tengah situasi global yang semakin menantang, baik karena tekanan inflasi dunia, pengetatan kebijakan moneter eksternal, maupun pemburukan kondisi perekonomian global. Pembangunan perekonomian di Indonesia sendiri tentunya melibatkan peranan setiap masing-masing daerah oleh karena itu pembangunan perekonomian lebih di arahkan pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri karena setiap daerah memiliki potensinya masing-masing.

Penerimaan Pajak daerah berperan besar dalam Pendapatan asli daerah (PAD) terbukti dari tahun 2017 sampai 2021 pajak daerah rata-tara menyumbang kepada PAD sebesar 85% dari pendapatan lainnya, penerimaan pajak daerah sendiri selama tiga tahun terakhir dari 2017-2019 selalu mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2020 kontribusi pajak daerah dalam pendapatan asli daerah pada lima tahun terakhir sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pada

34 Provinsi di Indonesia menunjukkan tren fluktuatif. Sebab salah satu komponen terbesar dari pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Angka tertinggi dicapai pada tahun 2018 dengan kontribusi mencapai 86% dengan angka terendah dicapai pada tahun 2017, 2020, dan 2021 dengan kontribusi hanya mencapai 84% dan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 85% pertahun.

Tabel 1. Kontribusi Pajak Daerah Dalam PAD 34 Provinsi di Indonesia 2017-2021

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Persentase Kontribusi
2017	149.307.806.874	125.806.425.501	84%
2018	158.721.480.199	136.095.291.940	86%
2019	169.993.478.633	144.039.477.959	85%
2020	148.710.876.245	124.904.437.246	84%
2021	178.319.196.941	149.872.962.853	84%

Besar kecilnya penerimaan pajak daerah tentu turut ditentukan oleh kondisi perekonomian di sekitarnya, karena semakin bergairah aktifitas ekonomi masyarakat maka akan menstimulus pendapatan daerah melalui pajak daerah yang dibayarkan oleh masyarakat melalui aktifitas ekonominya tersebut ukuran dalam menentukan

seberapa bergairah perekonomian bisa dilihat melalui pertumbuhan ekonomi tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Kelompok provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 57,89%, diikuti Pulau Sumatera sebesar 21,70%, Pulau Kalimantan sebesar 8,25%, Pulau Sulawesi sebesar 6,89%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,78%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,49%. Selama tahun 2021, sinyal pemulihan perekonomian dari efek pandemi COVID-19 mulai terlihat pada semua kelompok pulau. Pertumbuhan tertinggi (c-to-c) tercatat terjadi di kelompok Pulau Maluku dan Papua yang tumbuh sebesar 10,09%, diikuti Pulau Sulawesi sebesar 5,67%, Pulau Jawa sebesar 3,66%, dan Pulau Sumatera bersama Pulau Kalimantan sebesar 3,18%. Selanjutnya, kelompok provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, yang ekonominya banyak dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata, tumbuh sebesar 0,07% (BPS, 7 Februari 2022). Berikut data Laju pertumbuhan ekonomi dari 34 Provinsi di Indonesia selama tahun 2017-2021.

Tabel 2. Data Pertumbuhan Ekonomi 34 Provinsi di Indonesia 2017-2021

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2017	4,84%

2018	5,08%
2019	4,88%
2020	-1,84%
2021	2,28%

Dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan upaya meningkatkan penerimaan pajak ada factor yang berpengaruh pada kedua hal tersebut yaitu inflasi, menurut badan pusat statistik (BPS), inflasi berarti kenaikan barang dan jasa secara umum yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk turunnya daya jual mata uang suatu negara hal ini berdampak pada kegiatan produksi, karena ketika biaya produksi naik akan menyebabkan kegiatan investasi beralih pada kegiatan yang kurang mendorong produk nasional, investasi produktif akan berkurang dan kegiatan ekonomi menurun, investasi ini lebih cenderung kepada pembelian tanah, rumah serta bangunan dan jika produksi barang menurun hal ini akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian (Engka dkk, 2018) menerangkan inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung pada tinggi atau rendahnya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan

perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu.

Tabel 3. Tingkat Inflasi pada 34 provinsi di Indonesia 2017-2021

Tahun	Tingkat Inflasi
2017	3.61%
2018	3.13%
2019	2.72%
2020	1.68%
2021	1.87%

Penerimaan Pajak daerah berperan besar dalam Pendapatan asli daerah (PAD) terbukti dari tahun 2017 sampai 2021 pajak daerah rata-rata menyumbang kepada PAD sebesar 85% dari sumber pendapatan lainnya, penerimaan pajak daerah sendiri selama tiga tahun terakhir dari 2017-2019 selalu mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2020 penerimaa pajak dari 34 provinsi mengalami penurunan akibat adanya pandemic covid 19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak stabil akibat banyak akses perekonomian yang terhambat, tetapi pemerintah mengeluarkan strategi kebijakan guna memulihkan perekonomian Indonesia dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah sebagai peran utama pada pergerakan pemulihan perekonomian. Terbukti dengan strategi pemerintah dengan perlahan membuat kegiatan-kegiatan perekonomian kembali berjalan dan banyak

usaha-usaha baik di bidang jasa maupun produksi barang mulai melakukan aktivitas seperti biasa seperti sebelum adanya pandemic hal tersebut di dorong pemerintah yang berperan aktif dalam vaksinasi dan mulai melonggarkan aktivitas di tempat umum hal tersebut di dorong dengan terkendalnya tingkat inflasi, tingkat inflasi setiap tahunnya bisa turun dan terkendali dan membuat kondisi perekonomian cepat pulih. Terbukti pada tahun 2021 sinyal pemulihan pertumbuhan ekonomi mulai terlihat dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah sebesar 149.872.962.853 dari tahun sebelumnya hanya sebesar 124.904.437.246. Hal ini disebabkan banyaknya pemulihan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah dengan banyaknya aktivitas- aktivitas ekonomi yang mulai beroperasi seperti sebelum pandemic covid-19 terjadi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Stewardship Theory*. Menurut Putro (dalam jurnal Darmansyah dkk, 2018) teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Putro juga menjelaskan apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat

selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Hubungan teori *stewardship* dalam hal pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola pendapatan daerah atau dalam penelitian ini pajak daerah. Tujuannya adalah dana dari penerimaan pajak daerah tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang mana pemerintah daerah akan merasa puas ketika pencapaian target penerimaan pajak daerah tercapai sesuai dengan harapan. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi, jika ekonomi bergerak tumbuh setiap tahunnya maka pemerintah sebagai *steward* akan merasa puas akan hasil pertumbuhan ekonomi yang kian meningkat yang artinya sukses dalam menjalankan pemerintahan. Sebaliknya dengan tingkat inflasi, pemerintah sebagai *steward* akan merasa puas ketika tingkat inflasi menurun, artinya kinerja pemerintah berhasil dalam rangka memberikan kesejahteraan pada masyarakat yaitu dengan menurunnya tingkat inflasi. Pemerintah merupakan *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan manusia (rakyat) sebagai sumber daya yang utama, terjadi kesepakatan antara pemerintah dan rakyat dengan satu tujuan yang sama, dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab mengelola pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah masing-masing salah satu pendapatan daerah adalah pajak daerah yang dimana dari dana penerimaan pajak daerah ini akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Teori ini sesuai dengan

variabel penelitian, yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang dimana kedua variabel ini dapat dikendalikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

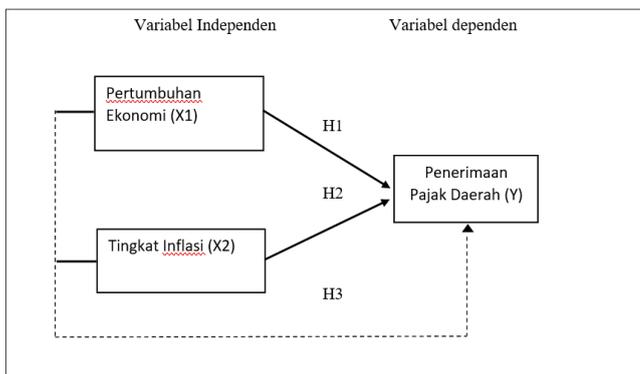
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Sukirno (2006), Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Kemampuan suatu negara atau daerah untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat dari satu periode ke periode lainnya.

Inflasi merupakan kejadian kenaikan harga secara umum dan terus menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi

barang, dalam kata lain inflasi jugaberarti penurunan nilai mata uang. Inflasi adalah indikator untuk melihat perubahan dan dianggap terjadi apabila terjadi kenaikan harga secara terus menerus dan saling mempengaruhi.

Berdasarkan penjelasan teori diatas dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Dari kerangka pemikiran diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan pada penerimaan pajak daerah di Provinsi di Indonesia Periode 2017-2021

H2: Inflasi berpengaruh signifikan pada penerimaan pajak daerah di Provinsi di Indonesia periode 2017-2021.

H3: Pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi di Indonesia periode 2017-2021.

### III. METODE PENELITIAN

#### Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kuantitatif menurut Sugiyono

(2019:17) Penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada popuasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode penelitian kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan statistik deskriptif, menurut Sugiyono (2019:29) statistik deskriptif adalah statistic yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Melalui statistik deskriptif maka dapat diperoleh deskripsi mengenai Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

#### Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada 34 Provinsi yang ada di Indonesia dengan data yang dapat diambil atau diakses melalui situs BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).) atau dari situs resmi pemerintah. Waktu penelitian dilaksanakan selama 7 bulan, dimulai dari menyusun proposal, pengolahan data, dan dengan laporan penelitian. Disusun pada ulan Juni tahun 2022, dan di selesaikan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

## Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2019:61) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Penerimaan Pajak Daerah di 34 Provinsi di Indonesia.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *quota sampling*, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. Sesuai dengan tujuan dari riset yang dilakukan adalah untuk mempelajari karakteristik dari seluruh provinsi di Indonesia pada periode 2017-2021 dengan cakupan yang luas. Penelitian ini dilakukan dengan maksud mengetahui hubungan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajakdaerah di provinsi di Indonesia periode 2017-2021.

## Metode pengumpulan data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara. Dalam Penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan, mencatat, mengunduh, dan

mengoah data yang berkaitan dengan penelitian.

## Metode analisis data

Metode analisis data dalam variabel-variabel ini terdiri dari metode statistik deskriptif dan metode data panel dan analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini, Metode analisis data dalam dalam penelitian ini menggunakan perhitungan statistic, dengan menggunakan aplikasi *E-Views*

*12* dan *Microsoft Excel*. Bentuk model regresi berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Pajak Daerah

$\alpha$  : Koefisien

$\beta_1, \beta_2$ , : Koefisien Variabel Independen

X1 : Laju Pertumbuhan Ekonomi

X2 : Tingkat Inflasi

e : Standar Error

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Statitik Deskriptif

Date: 02/02/23 Time: 04:52  
Sample: 2017 2021

	Pertumbuhan Ekonomi (X1)	Inflasi (X2)	Pajak daerah (Y)
Mean	3.594941	2.506118	4.01E+09
Median	4.695000	2.410000	1.42E+09
Maximum	16.40000	7.550000	4.34E+10
Minimum	-15.74000	0.020000	2.41E+08
Std. Dev.	3.718325	1.157564	7.26E+09
Skewness	-1.052939	0.676826	3.503072
Kurtosis	7.946276	4.380747	16.11952
Jarque-Bera	204.7109	26.48341	1566.890
Probability	0.000000	0.000002	0.000000
Sum	611.1400	426.0400	6.82E+11
Sum Sq. Dev.	2336.584	226.4522	8.90E+21
Observations	170	170	170

### Hasil Uji Pemilihan Model

#### Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: FEM  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	320.383325	(33, 134)	0.0000
Cross-section Chi-square	744.732684	33	0.0000

**Jurnal Akuntansi & Perpajakan**, Volume 3, No. 2, Februari 2023

*Cross-section Chi-square* sebesar 744.732684 dengan nilai probability 0.0000. Hal tersebut berarti kurang dari 0.05 ( $0.0000 < 0.05$ ) maka secara statistic  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga dalam uji *chow* ini, model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM), namun belum dapat menentukan model mana yang akan digunakan sehingga perlu dilakukan uji *Hausman*

**Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: REM  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.226908	2	0.8927

Nilai distribusi statistic Chi-Square berdasarkan adalah sebesar 0.226908 dengan nilai Probability 0.8927. Hal tersebut berarti lebih dari 0.05 ( $0.8927 > 0.05$ ) maka secara statistic  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Sehingga dalam uji hausman ini, yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM). Maka model data panel harus dibandingkan kembali antara *Random Effect model* dan *Common Effect Model* menggunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM).

**Hasil Uji Lagrange Multiplier**

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects  
Null hypotheses: No effects  
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

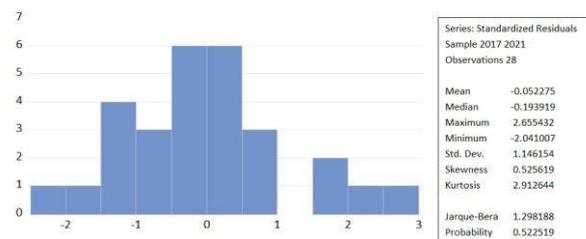
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	328.3183 (0.0000)	2.271169 (0.1318)	330.5895 (0.0000)

Berdasarkan hasil uji *lagrange multiplier* diketahui bahwa nilai Cross-section Breusch-pagan sebesar 328.3183 dengan nilai Probability 0.0000 hal tersebut berarti kurang dari 0.05 ( $0.0000 < 0.05$ )

maka secara statistic  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Sehingga dalam uji Lagrange Multiplier ini yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM). Hasil pemilihan model dapat disimpulkan bahwa dari ketiga model yang terpilih sebagai model terbaik adalah menggunakan *Random Effect Model* (REM).

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**



Berdasarkan uji normalitas menggunakan *Jarque-Bera* diketahui nilai probabilitas adalah 0.522519 lebih besar dari 0.05 ( $0.522519 > 0.05$ ), dan nilai *Jarque-Bera* adalah 1.298188 lebih kecil dari 2 ( $1.298188 < 2$ ), maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berdistribusi normal.

**Uji Multikoleniaritas**

Variance Inflation Factors  
Date: 02/02/23 Time: 12:16  
Sample: 1 170  
Included observations: 170

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.82E+18	5.798046	NA
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	2.54E+16	2.162874	1.114730
Inflasi (X2)	2.62E+17	6.370606	1.114730

Berdasarkan pebujian terhadap nilai *Centered VIF* masing-masing variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi bernilai 1.114730  $< 10$  dan inflasi sebesar 1.114730  $< 10$ , kedua variabel Independen menghasilkan nilai lebih kecil dari 10 atau  $< 10$ , maka dapat disimpulkan

bahwa pebelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas.

### Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
Date: 02/10/23 Time: 15:25  
Sample: 2017 2021  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 34  
Total panel (balanced) observations: 170  
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.97E+08	1.38E+08	3.608774	0.0004
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	-9884437.	12425423	-0.795501	0.4275
Inflasi (X2)	-52561471	39677556	-1.324715	0.1871

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji glejser pada data panel menunjukkan nilai probabilitas variabel X1 0.4275 lebih besar dari 0.05 ( $0.4275 > 0.05$ ) dan nilai probabilitas X2 0.1871 lebih besar dari 0.05 ( $0.1871 > 0.05$ ) sehingga dapat simpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji Autokolerasi

R-squared	0.705813	Mean dependent var	2.24E-07
Adjusted R-squared	0.698682	S.D. dependent var	7.25E+09
S.E. of regression	3.98E+09	Akaike info criterion	47.07706
Sum squared resid	2.62E+21	Schwarz criterion	47.16929
Log likelihood	-3996.550	Hannan-Quinn criter.	47.11448
F-statistic	98.96716	Durbin-Watson stat	1.940215
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil uji autokolerasi menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1.940215 yang selanjutnya nilai Durbin-Watson akan di bandingkan dengan kriteria yang ditetapkan yaitu  $-2 < 1.940215 < +2$  karena nilai Durbin-Watson berada diantara -2 dan +2 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah autokolerasi.

### Hasil Uji Hipotesis

### Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

$$Y = 4.20E +09 + 52.006234X_1 - 1.49E+08X_2 + e$$

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien konstanta sebesar 4.20E+09, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel laju pertumbuhan ekonomi (X1) dan tingkat inflasi(X2) dianggap konstan, maka besarnya penerimaan pajak daerah (Y) pada provinsi di Indonesia adalah sebesar 4.20E+09.
2. Koefisien variabel pertumbuhan ekonomi(X1) sebesar 52.006234 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan apabila pertumbuhan ekonomi (X1) meningkat, maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah (Y) dengan asumsi variabel independent lainnya konstan, maka penerimaan pajak daerah (Y) di provinsi di Indonesia akan mengalami peningkatan sebesar 52.006234.
3. Koefisien variabel tingkat inflasi (X2) sebesar 1.49E+08 dan bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa jika tingkat inflasi (X2) menurun maka akan menurunkan nilai penerimaan pajak daerah (Y) dengan asumsi variabel independent lainnya konstan, maka penerimaan pajak daerah (Y) di provinsi di Indonesia akan mengalami peningkatan sebesar 1.49E+08.

### Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, Volume 3, No. 2, Februari 2023

R-squared	0.039502	Mean dependent var	2.18E+08
Adjusted R-squared	0.027999	S.D. dependent var	9.20E+08
S.E. of regression	9.07E+08	Sum squared resid	1.37E+20
F-statistic	3.434083	Durbin-Watson stat	2.424526
Prob(F-statistic)	0.034550		

Berdasarkan hasil pemilihan model yang terpilih adalah menggunakan *Random Effect Model* (REM), maka hasil uji statistic dapat dilihat bahwa  $F_{hitung}$  sebesar 3.434083 dan nilai Probabilitas F- sebesar 0.034550. Sedangkan untuk mencari  $F_{tabel}$  dengan jumlah sampel ( $n$ )=170, jumlah variabel bebas dan variabel terikat =3.  $F_{tabel}$  bisa dilihat pada tabel distribusi F dengan tingkat signifikansi 0.05 dengan  $df_1=k-1(3-1=2)$ ,  $df_2=n-k(170-3=167)$  dimana  $n$  adalah jumlah sampel dan  $k$  adalah jumlah variabel bebas dan variabel terikat sehingga didapat  $F_{tabel}$  sebesar 3.05012. Berdasarkan hasil nilai  $F_{tabel}$  yang diperoleh sebesar 3.05012 sehingga sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan.

- 1)  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $3.434083 > 3.05012$ ) dinyatakan berpengaruh.
- 2) Nilai Probabilitas F-statistic  $< 0.05$  ( $0.034550 < 0.05$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Maka dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

### Hasil Uji Statistik Parsial (Uji t)

C	4.20E+09	1.30E+09	3.232197	0.0015
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	52006234	22604487	2.300704	0.0226
Inflasi (X2)	-1.49E+08	72097532	-2.061586	0.0408

Berdasarkan hasil pengujian statistic  $t$  dengan menggunakan *Random Effect Model* (REM) yang dilakukan secara parsial untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independent. Sedangkan untuk mencari  $t_{tabel}$  dengan jumlah sampel  $n=170$ , dengan jumlah variabel bebas dan variabel terikat  $k=3$  dengan signifikansi yaitu 5% atau 0.05 dengan  $df=n-k=(df=170-3=167)$ . Sehingga didapat nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1.974271. Dari hasil uji  $t$  pada tabel 4.13 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah

Berdasarkan hasil uji  $t$  pada tabel 4.13 variabel pertumbuhan ekonomi (X1) atas dasar pengambilan keputusan yang ditetapkan menunjukkan bahwa, nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2.300704 > t_{tabel}$  sebesar 1.974271 maka dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan nilai probabilitas  $0.0226 < tingkat\ signifikansi\ 0.05$ . Artinya pertumbuhan ekonomi (X1) berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah (Y).

- 2) Pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah

Berdasarkan hasil uji  $t$  pada tabel 4.13 variabel tingkat inflasi (X2) atas dasar pengambilan keputusan yang di tetapkan menunjukkan bahwa, nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2.061586 > T_{tabel}$  sebesar 1.974271 maka dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan nilai probabilitas  $0.0408 < tingkat\ signifikansi$

0.05. Artinya tingkat inflasi (X2) berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah (Y).

### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

R-squared	0.039502	Mean dependent var	2.18E+08
Adjusted R-squared	0.027999	S.D. dependent var	9.20E+08
S.E. of regression	9.07E+08	Sum squared resid	1.37E+20
F-statistic	3.434083	Durbin-Watson stat	2.424526
Prob(F-statistic)	0.034550		

Berdasarkan uji koefisien determinasi  $R^2$  dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.027999 artinya kemampuan variabel independent (pertumbuhan ekonomi dan inflasi) mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 2.79% sedangkan sisanya sebesar 97.21% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Hasil pada penelitian ini menunjukkan variabel laju pertumbuhan ekonomi memiliki nilai  $t$  hitung sebesar 2.300704 yang berarti lebih besar dari  $t$  tabel (2.300704 > 1.974271) dengan nilai *probability* 0.0226 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi (0.0226 < 0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi di Indonesia periode 2017-2021.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi di Indonesia periode 2017-2021. Dengan kata lain peningkatan atau penurunan laju pertumbuhan

ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* karena pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah pusat selalu berupaya untuk melakukan peninjauan pada setiap provinsi yang ada di Indonesia untuk melihat potensi sumber daya yang dimiliki setiap daerah supaya pemerintah bisa mendukung potensi tersebut salah satunya dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang merata agar ekonomi di setiap provinsi bisa terus meningkat setiap tahunnya karena dengan peningkatan tersebut bisa menambah pendapatan negara terutama pada penerimaan pajak daerah.

### 2. Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Hasil pada penelitian ini menunjukkan variabel tingkat inflasi memiliki nilai  $t$  hitung pada variabel tingkat inflasi (X2) sebesar 2.061586 yang artinya lebih besar dari  $t$  tabel (2.061586 > 1.974271) dengan nilai *probability* sebesar 0.0408 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi (0.0408 < 0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi di Indonesia periode 2017-2021. Dengan kata lain tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil ini sejalan dengan teori *stewardship*

bahwa adanya inflasi karena banyaknya permintaan atas barang dan jasa secara umum yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat inflasi yang cenderung ringan membawa pengaruh positif untuk mendorong perekonomian karena dengan adanya permintaan barang yang banyak membuat produsen lebih banyak membuat barang lebih banyak sehingga membuat peluang kerja untuk pencari kerja, hal ini membantu pendapatan nasional, mendorong masyarakat untuk menabung, investasi, dan bekerja hal ini juga dipengaruhi oleh kebijakan yang di berikan pemerintah. Tingginya inflasi akan berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menyebabkan penurunan pendapatan daerah.

### 3. Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengujian uji statistic F pada tabel 4.12, diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 3.434083 dan nilai *probabillity* (F-Statistik) sebesar 0.034550, dan diperoleh nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3.05012. Dan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  3.434083 > nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3.05012 dan nilai probabilitas F-statistik  $0.034550 < 0.05$  nilai signifikansi. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan artinya laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi di Indonesia periode 2017-2021. Hasil ini sejalan dengan teori stewardship yang dimana peran pemerintah

menentukan pendapatan daerah itu sendiri karena dengan pemerintah berhasil mengatur dan mengontrol pembangunan daerahnya sehingga pertumbuhan ekonomi akan bertambah dan inflasi akan terkendali sehingga masyarakat akan merasa puas dan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan untuk membayar pajak dan hal tersebut akan menambah penerimaan pajak daerah.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara laju pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dan meningkatnya variabel laju pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah.
2. Hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dan meningkatnya variabel tingkat inflasi maka penerimaan pajak daerah akan semakin meningkat.
3. Hasil penelitian uji F menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah.

### SARAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan hasil berupa beberapa saran yang bisa diberikan kepada lingkungan akademis, penulis dan kepada pemerintah. Saran-saran tersebut antara lain :

1. Bagi penulis penelitian ini digunakan sebagai syarat menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana program studi Akuntansi dan untuk meningkatkan, memperluas dan mengembangkan pemahaman keilmuan terutama yang terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi di Indonesia.
2. Untuk pihak akademis dapat dijadikan sebagai gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah provinsi di Indonesia, serta mampu menambah sumber kepustakaan dan dapat menyediakan informasi bagi pihak yang membutuhkan.
3. Untuk pemerintah dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk menentukan langkah strategi selanjutnya dalam memberikan peraturan-peraturan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghambat inflasi agar bisa dikendalikan sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah provinsi.
4. Bagi wajib pajak dan masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman

kepada masyarakat yang merupakan wajib pajak agar dapat mengerti pentingnya membayar pajak dan penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak dalam membayar pajak semakin meningkat.

5. Bagi peneliti selanjutnya agar penelitian ini mampu memberikan referensi bagi pembaca dan diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak lain untuk menambah pengetahuan sebagai sarana untuk bahan penelitian selanjutnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2017-2020*. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (22). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2018-2021*. Jakarta: BPS-Statistics Indonesia.
- Bululung, W., Prang, J. D., & Mongi, C. E. (2021). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Manado Sulawesi Utara. *Jurnal Matematika dan Aplikasi*, 06, 40-46.
- Effriyanti. (2013). PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP PENGEMBALIAN RESTITUSI. *JEMASI Vol.9 No.1, Jan. 2013*, 9, 24-38.

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Juri, H. M., Ruzaldi, A., & Verawati. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Eksis*, 15, 81-94.
- Lumy, D. G., kindangen, P., & Engka, D. S. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19, 1-16.
- Maulida, R. (2018, 09 06). *Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya*. Retrieved from Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah>
- Mispiyanti, & Kristanti, I. n. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Kurs dan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 7, 23-37.
- Murni, A. (2016). *Ekonomika Makro Edisi Revisi*. Bandung: Refika Aditama.
- Purwanto, E., & Rohman, S. (2018). Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung Periode 2008 s.d 2017. *Prosiding Seminar Nasional 2018*, 38-46.
- Rachmania, S. D., Hendrati, I. M., & Asmara, K. (2020). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009-2019. *Jurnal Studi Bisnis dan Administrasi*, 3, 62-84.
- Ruhyat, E. (2018). THE ANALYSIS OF AGRICULTURE LEADING SECTOR AGAINST ECONOMIC GROWTH IN BOGOR REGENCY OF WEST JAVA PROVINCE. *Economic, Accounting, Management and Bussines*, 1, 191-200.
- Sania, H., Yunita, E. A., & Muttaqim, I. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Permana*, IX, 74-86.
- Sarjono, N., Anwar, C., & Darmansyah. (2018). Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dengan Tingkat Kemiskinan Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 6, 113-127.

- SUGIYANTO. (2018). PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PEMODERASI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2011-2015). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(1), 82-96., 82-96.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi. Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Yessila Xena, G. A. (2018). Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kalimantan Timur. *CURVANOMIC*, 1-13.
- Yudawirawan, M. Y., Yanuar, Y., & Hamdy, S. (2022). PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, KONEKSI POLITIK DAN FOREIGN ACTIVITY TERHADAP TAX AVOIDANCE. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5, 102-113.
- Zein, A., & Abuyamin, O. (2016). *Perpajakan: Dasar-dasar perpajakan; KUP; PPh; PPN & PPnBM; Pajak daerah dan retribusi daerah; PPSP; pengadilan pajak; pengantar perpajakan internasional*. Bandung: Mega Rancage Press.